



PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 102).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan yang memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
  - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - Laporan Operasional;
  - Laporan Perubahan Ekuitas;
  - Neraca;
  - Laporan Arus Kas; dan
  - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp62.300.679.833.068,00	
b. Belanja Daerah	Rp64.938.363.682.013,00	
Defisit		(Rp2.637.683.848.945,00)
c. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan Pembiayaan	Rp11.781.958.541.707,00	
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp 7.934.855.586.453,00	
Pembiayaan Neto		Rp3.847.102.955.254,00
d. Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi		(Rp 5.447.649.613,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		Rp1.203.971.456.696,00

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp12.696.817.542.413,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                |                              |
|--|----------------|------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp             | 74.997.497.375.481,00        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp</u>      | <u>62.300.679.833.068,00</u> |
|  | Selisih kurang | (Rp 12.696.817.542.413,00)   |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp12.919.246.682.148,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                |                              |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp             | 77.857.610.364.161,00        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp</u>      | <u>64.938.363.682.013,00</u> |
|                                       | Selisih kurang | (Rp 12.919.246.682.148,00)   |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp222.429.139.735,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |               |                              |
|---|---------------|------------------------------|
| a. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp           | 2.860.112.988.680,00)        |
| b. Realisasi                                  | <u>(Rp</u>    | <u>2.637.683.848.945,00)</u> |
|   | Selisih lebih | Rp 222.429.139.735,00        |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp113.041.181.069,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp             | 11.894.999.722.776,00        |
| b. Realisasi  | <u>Rp</u>      | <u>11.781.958.541.707,00</u> |
|   | Selisih kurang | (Rp 113.041.181.069,00)      |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.100.031.147.643,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                |                             |
|--|----------------|-----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp             | 9.034.886.734.096,00        |
| b. Realisasi   | <u>Rp</u>      | <u>7.934.855.586.453,00</u> |
|  | Selisih kurang | (Rp 1.100.031.147.643,00)   |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp986.989.966.574,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |               |                             |
|--|---------------|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp            | 2.860.112.988.680,00        |
| b. Realisasi                                   | <u>Rp</u>     | <u>3.847.102.955.254,00</u> |
|  | Selisih lebih | Rp 986.989.966.574,00       |

(7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah	Rp	540.165.775.976,00
b. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	9.276.330.233,00
c. Kas di Bendahara Pengeluaran (termasuk Piutang kelebihan pembayaran pihak ketiga)	Rp	103.905.241.245,00
d. Kas dan Setara Kas BLUD	Rp	550.624.109.242,00
SiLPA Tahun 2019	Rp	<u>1.203.971.456.696,00</u>

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih per 1 Januari 2019	Rp	9.755.082.722.776,00
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp)	9.755.082.722.776,00)
c. Pendapatan	Rp	62.300.679.833.068,00
d. Belanja	(Rp)	64.938.363.682.013,00)
e. Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.781.958.541.707,00
f. Pengeluaran Pembiayaan	(Rp)	7.934.855.586.453,00)
g. Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi	(Rp)	5.447.649.613,00)
h. Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019	Rp	<u>1.203.971.456.696,00</u>

#### Pasal 5

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp	83.819.992.150.676,00
b. Beban	(Rp)	<u>61.627.222.487.782,00)</u>
Surplus dari Kegiatan Operasional		Rp22.192.769.662.894,00
c. Surplus Non Operasional	Rp	18.810.190.932,00
d. Defisit Non Operasional	(Rp)	<u>69.833.189.086,00)</u>
Surplus dari Kegiatan Non Operasional		(Rp51.022.998.154,00)
e. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
f. Beban Luar Biasa	(Rp)	<u>1.850.377.022,00)</u>
Pos Luar Biasa		<u>(Rp1.850.377.022,00)</u>
Surplus - LO		<u>Rp22.139.896.287.718,00</u>

## Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a. Ekuitas per 1 Januari 2019	Rp	486.443.850.019.158,00
b. Koreksi Penambahan Ekuitas	Rp	6.528.784.489.601,00
c. Koreksi Pengurangan Ekuitas	(Rp)	8.540.135.382.096,00)
d. Surplus - Laporan Operasional	Rp	22.139.896.287.718,00
e. Ekuitas per 31 Desember 2019	Rp	506.572.395.414.381,00

## Pasal 7

Neraca per 31 Desember 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	517.155.089.689.488,00
b. Jumlah Kewajiban	Rp	10.582.694.275.107,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp	506.572.395.414.381,00

## Pasal 8

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp	9.756.644.970.273,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	7.271.923.028.405,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp)	15.783.957.034.581,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp)	33.629.623.430,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp)	1.432.938.713,00)
f. Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi	(Rp)	5.447.649.613,00)
g. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019	Rp	1.204.100.752.341,00;

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

